Tampaknya perkembangan demokrasi Pancasila masih menekankan kepada beberapa unsur saja dari sila keempat itu, yaitu unsur-unsur perwakilan dan permusyawaratannya. Perwakilan cenderung dikembangkan lepas hubungannya yang terus menerus dengan pihak yang diwakili. Akibatnya konkretisasi dari perwakilan hanya terjadi menjelang pemilu, dan sesudah itu wakil-wakil rakyat itu lebih memelihara relasi dengan struktur kelembagaan intern legislatif dan dengan eksekutif.

Sebagai kelompok masyarakat khusus, ada kecenderungan bahwa wakil-wakil rakyat itu tidak terbuka mengenai substansi yang dibahasnya kepada masyarakat/ rakyat. Materi bahasan diperlakukan sebagai bahan eksekutif yang hanya dimiliki hak memahaminya secara istimewa oleh kelompok wakil-wakil rakyat tersebut. Tradisi yang ingin dilembagakan oleh Kharis Suhud yaitu tradisi menjelaskan kepada rakyat lewat TVRI tentang kegiatan dan substansi kegiatan wakil rakyat itu belum lagi berkembang. Anggota DPR/MPR lebih bergaya eksekutif dengan corak eksklusifisme informasi semacam itu.

Permusyawaratan, sementara itu lebih mengembangkan kepekaan terhadap keinginan pemim-

pin pada aras atas dan hanya sebagian kecil saja yang mempekakan diri kepada aspirasi rakyat. Kecenderungan ini ditopang oleh struktur organisasi kerja wakil rakyat itu, mereka berorientasi pada fungsinya sebagai kelompok fraksi, bukan wakil rakvat. Akibatnya dimensi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan put berorientasi kepada rakyat. Hal ini menunjukkan perlunya tiap aspek dari sila ke 4 itu mendapat upaya pengembangan yang setara, agar proses permusyawaratan sungguh-sungguh memenuhi fungsi perwakilan. Dengan demikian, mutu hasilnya mencapai taraf yang tinggi karena menggunakan kebijaksanaan dalam arti yang selengkap mungkin (itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan) atau Demokrasi Pancasila, permusyawaratan / perwakilan memberi perhatian yang setara kepada semua dimensi, termasuk kepada kepentingan rakyat.

Jadi Demokrasi Pancasila belumlah seimbang dikembangkan dalam dinamika politik hingga kini, apabila dimensi struktur hubungan dengan eksekutif dan struktur organisasi internal badan legislatifnya yang lebih dikembangkan, sedangkan orientasi kepada rakyat (seperti implisit dalam ungkapan